BAB II
PENDIDIKAN POLITIK PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO : 2 / 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

A. Pengertian Partai Politik Islam

Sebelum pembahasan istilah partai politik Islam, perlunya untuk mengetahui istilah dari setiap kata dalam satu kalimat tersebut. Partai menurut Al-Khalīl ibn Ahmad dalam kitabnya *mu'jam al-'Ain* dibahasakan dengan kata *al-hizb* (partai) yang artinya pendukung seseorang dalam mengikuti pendapat, atau setiap kaum yang bersatu dalam cita-cita dan amal perbuatan. Partai adalah setiap kelompok yang mempunyai keinginan dan tujuan yang satu. Sedangkan Menurut *Ibn Kathīr* dalam kitab tafsirnya *al-Qur'an al-Azim* partai diartikan sebagai kaum, umat atau sebuah komunitas masyarakat atau hamba-hamba Allah yang dimuliakan.[1]

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Partai yaitu perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan, dan setujuan terutama di bidang politik.[2]

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu artinya negara kota, setelah itu berkembang seiring bergantinya pola pikir para ilmuwan menjadi kata polities (warga negara), *politikos* (kewarganegaraan atau civic), dan *politike tehne* (kemahiran politik), dan *politike epistem* (ilmu politik),[3] Sedangkan menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah

---

[1] Abū al-Fidā' Ibn al-Kathīr (t.t), *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, (Beirūt : dār al-ma'rifah, juz. 3), 77.
[2] B. N. Marbun, *Kamus Politik*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 402.
[3] Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.[4] Bernard lewis memaknai kata "politik" sebagai *siyasa*, atau *statecraft* yang berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan ketrampilan memerintah.[5]

Hasan Al Banna mengartikan politik dengan arti upaya untuk memikirkan persoalan internal kepemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsi, merinci kewajiban dan haknya, melakukan pengawasan kepada terhadap penguasa untuk dipatuhi dan menghapus penindasan ataupun intervensi pihak lain dalam urusan-urusanya, serta memberikan semangat agar tidak mempersulit karyawan dalam pembagian saham.[6]

Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[7]

---

[4] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 8.

[5] Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam* (terjemahan Ihsan Ali Fdauzi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 178.

[6] Utsman Abdul Mu'iz Ruslan,DR, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*, (Solo:Era Intermedia, 2000), 72.

[7] Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, Miriam Budiardjo mengartikan partai politik[8] sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dengan tujuan untuk memperoleh dan merebut kedudukan politik dengan cara *konstitusionil* dalam melaksanakan kebijaksanaan–kebijaksanaan mereka.

Sumarno dan Yeni Lukiswara, mereka mengartikan Partai Politik sebagai sekelompok manusia yang mengorganisir dirinya dalam bentuk organisasi politik yang didasarkan pada suatu ideologi, dengan maksud untuk memperoleh atau merebut suatu kekuasaan didalam pemerintah. Jadi partai politik merupakan perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah.[9]

Bambang Cipto berpandangan bahwa partai politik merupakan peralihan jangka panjang dari istilah fraksi yang jauh lebih tua umurnya, sifat peralihan ini menyebabkan proses pengakuan masyarakat politik terhadap keberadaan partai penuh dengan kesukaran dan rintangan.[10]

Sedangkan menurut Deliar Noer, Partai politik merupakan himpunan orang-orang yang se-ideologi atau tempat/wadah penyaringan dan pembulatan, serta tempat berkumpulnya orang – orang yang se-ide, cita-cita dan kepentingan.[11]

---

[8] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, cet-XIX, 1993), 160
[9] Sumarno dan Yeni R.Lukiswara, *Pengantar Study Ilmu Politik*, (Bandung : Citra Adtya Bakti, 1992), 62.
[10] Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 7
[11] Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1983), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang terbentuk oleh masyarakat negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan visi dan misi untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Abdul Qadir sesungguhnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, politik Islam/syari'ah adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam.[12] Pengertian Partai ini diterima oleh Islam bahkan sangat penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, sudah seharusnya ada satu jama'ah yang bersatu menegakkan yang benar dan memberantas kemungkaran.

Perlu kita ketahui bahwa dari partai Politik Islam, aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok mendukung perpolitikan dengan penggunaan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, *khittah* perjuangan, serta wacana politik model Islam struktural bisa melalui Islam politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai.[13]

Namun setiap cara ini tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan umat.

---

[12] Abdul Qodir, *Fikih Politik Menurut Imam Hasan Al-Banna*, 2003.13

[13] Nasiwan, *Geliat Islam Dalam Pentas Politik Nasional Kontemporer*, (Pontianak: Insan Cita, 2003), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah partai digunakan dalam dua bentuk dalam al-Qur'an dan al-Sunnah bermakna terpuji seperti firman Allah S.W.T yaitu sebagai berikut[14]:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya : "Dan, barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orangorang beriman menjadi walinya (tempat memberikan sokongan dan keta'atan), maka sesungguhnya partai Allah (hizbullāh) itulah yang pasti menang".

Nabi Muhammad s.a.w bersabda :

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

Artinya : " Rasulullah berdoa kepada Allah pada hari perang Ahzab dari kejahatan pasukan kafir, dengan mengatakan : Ya Allah yang menurunkan al-Kitab, yang mempercepat perhitungan, dan yang mengalahkan parti-parti (ahzāb), kalahkanlah mereka, goncangkanlah mereka, dan menangkanlah kami atas mereka!"[15]

Menurut *syarī'ah* pengertian partai bukanlah sesuatu yang asing dalam politik Islam. Partai yaitu perkumpulan dan kerjasama antar kalangan manusia yang saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang dalam kemungkaran, pengertian ini diterima oleh Islam bahkan sangat penting bagi umat Islam.[16]

Berbagai pengertian tentang politik, politik Islam dan partai politik, "partai politik Islam" menurut penulis adalah suatu kelompok masyarakat muslim yang terorganisir dalam suatu wadah organisasi yang menjadikan Islam (Qur'an dan

---

[14] 7 Sūrat al-Māidah (5) : 56

[15] Al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī,* bāb berdo'a kepada Allah s.w.t untuk mengalahkan kaum Musyrikin, (Bandung : Mizan, tt), 521.

[16] Al-'Umar Taisīr Khamīs (1998), *Hurriyatu al-I'tiqād fī zilli al-Islam*, (Beyrūt : dār al-fikr, tt), 591.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits) sebagai dasar dan garis perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi, maupun ide dan cita-cita umat Islam dalam suatu negara.

Partai Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pertama, Partai yang mempunyai program perjuangan untuk Islam, umat Islam, serta kemaslahatan umat, baik lewat jalur parlementer maupun ekstra parlementer.
2. Kedua, Partai yang menggunakan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai landasan untuk kemantapan perjuangan partai.
3. Ketiga, Partai yang menggunakan Islam (Qur'an, Sunah Rasul dan Syari'ah) sebagai azas dalam menentukan visi dan misi perjuangan partai.
4. Keempat, Partai yang menggunakan Islam sebagai dasar ideologi dalam pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.
5. Kelima, Partai mempunyai mempunyai basis pendukung, kader, dan partisan yang keseluruhannya beragama Islam, Ciri di atas merupakan khas partai politik Islam seperti partai Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai *Nahdlotul Ummah*, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bintang Reformasi dan masih banyak lagi.

B. Fungsi Partai Politik Islam

Menurut Undang-Undang Tentang partai Politik Nomor 31 tahun 2002, partai politik berfungsi sebagai;

1. Pertama, partai politik berfungsi sebagai Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indoesia yang sadar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Kedua, partai politik berfungsi sebagai penciptaan yang kondusif dan program kongkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat
3. Ketiga, partai politik berfungsi sebagai Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Keempat, partai politik berfungsi sebagai partisipasi politik warga negara,
5. Kelima, partai politik berfungsi sebagai rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik maksudnya bahwa tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (*Interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratu. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (Interest articulation). [17]

Partai Islam dalam mengemban visi dan misinya menjadikan partai sebagai sarana untuk membangun sarana komunikasi yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat khususnya aspirasi umat Islam. menjadikan partai sebagai sarana

[17] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membangun sarana komunikasi yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat khususnya aspirasi umat Islam menjadikan partai sebagai sarana untuk membangun sarana komunikasi yang efektif dalam menyalurkan aspirasi rakyat khususnya aspirasi umat Islam.

Partai yang mempunyai basis masa kaum Muslimin dalam perjuangannya memperoleh kedudukan di parlemen ini maksudkan supaya aspirasi masyarakat Islam dalam diakomodir diparlemen dan ini merupakan perjuangan parlementer. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah atau dakwah, pelatihan kader, penataran dan sebagainya.

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Namun praktik dilapangan justru sebaliknya, justru informasi yang diberikan menimbulkan kegelisahan dan perpecahan masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan[18] nasional akan tetapi kepentingan partai, terjadi pengkotakan politik, konflik tidak diselesaikan, akan tetapi malah dipertajam.

C. Kontribusi Partai Politik Islam

Allah S.W.T menguak sejarah keberadaan partai-partai pada suatu masa dan umat terdahulu, ada yang ditolak dan ada pula yang diterima. Allah SWT. berfirman : (al ahzab 11-13)

[18] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُنَالِكَ ٱبۡتُلِيَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَزُلۡزِلُواْ زِلۡزَالٗا شَدِيدٗا ﴿١١﴾ وَإِذۡ يَقُولُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ
وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورٗا ﴿١٢﴾ وَإِذۡ قَالَت طَّآئِفَةٞ
مِّنۡهُمۡ يَٰٓأَهۡلَ يَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَٱرۡجِعُواْۚ وَيَسۡتَـٔۡذِنُ فَرِيقٞ مِّنۡهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ
بُيُوتَنَا عَوۡرَةٞ وَمَا هِيَ بِعَوۡرَةٍۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارٗا ﴿١٣﴾

Artinya : "Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang sangat. dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata :"Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada Kami melainkan tipu daya". dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mreka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka Kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah-rumah Kami terbuka (tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari."

Berdasarkan keterangan di atas pastinya sebuah partai politik Islam harus diwujudkan karena keberadaannya diakui dan menjadi salah satu sarana untuk beramal Islam secara bersama. Keberadaan partai tersebut memang harus ada guna mengedepankan visi dan misi Islam dalam era pemerintahan modern ini dan menggandeng partai-partai politik lain supaya mengenal ajaran-ajaran Islam secara lebih mendalam.

D. Pendidikan Politik Berbasis Masyarakat Oleh Partai Politik

Pelaksanaan pemilu dewasa ini sangat membutuhkan Pendidikan politik, bukan hanya sekedar memberikan pemahaman tentang teknik dan tata cara pencoblosan dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya, namun bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyentuh nilai/norma yang lebih mengarah pada arti dan peran penting pada pemilu.

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris hampir sama dengan *political sucialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, Istilah *political sosialization* bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political sosialization* banyak yang menyamakan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik.[19]

Menurut Surbakti, Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.[20]

Dari keterangan ahli di atas dapat dijabarkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoha untuk

---

[19] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Polilik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999), 117.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial.

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang - dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Adapun pendidikan politik menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. *Pertama*, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. *Kedua*, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik.

Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan yang ada di negara tersebut.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai macam media, seperti keluarga, sekolah, kelompok dan sarana informasi. Secara garis besar terdapat lembaga-lembaga pendidikan politik yang terdiri dari lembaga formal dan informal. Keluarga, sekolah, partai-partai politik dan media massa dengan segala jenisnya.

Partai-partai politik khususnya partai politik Islam di Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengubah kultur politik mulai dari partai biasa menjadi partai dengan kapasitas kualitas muslim. Partai politik menjadi lebih besar dari sekedar alat pemilu atau perkumpulan yang mengartikulasikan sikap politik bagi sekelompok manusia, Berdirinya partai-partai dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya.

Pemaparan di atas telah menggambarkan secara jelas bahwa terdapat hubungan yang erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menarik perhatian banyak kalangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan politik dengan berbagai muatannya pernah menimbulkan perdebatan tersendiri di kalangan para ahli pendidikan maupun ahli politik di Inggris. Terdapat golongan yang mendukung dan juga golongan yang menentang

Argumen-argumen yang mendukung pendidikan politik datang. baik dari golongan kanan maupun dari golongan kiri dunia politik. Tokoh-tokoh yang mendukung keberadaan pendidikan politik antara lain Nicholas Haines, Denis Heater, Robert Stradling, Robert Dunn, dan Profesor Ridley. Sedangkan tokoh-tokoh yang menentang pelaksanaan pendidikan politik di persekolahan antara lain adalah Samuel Beers, Roger Scruton, Sir Karl Popper, Michael Oakeshott, dan Michael Polanyi.[21]

Argumen yang sangat mendukung keberadaan pendidikan politik datang dan Denis Heater. Heater mengemukakan bahwa golongan orang dewasa seharusnya dapat membuat pilihan dan sudah siap untuk ambil bagian dalam beberapa kegiatan politik di dalam suatu sistem demokrasi yang representatif. Untuk itu, pendidikan politik harus diperkenalkan sejak dini agar mereka sudah sangat memahami prosedur politik yang benar pada saat dewasa nanti.

Pendapat Denis Heater tersebut sangat berlawanan dengan argumentasi yang datang dari Michael Oakeshott dan Michael Polanyi yang menyatakan hahwa sangat ganjil mengajarkan keahlian berpolitik kepada generasi muda.

---

[21] http://uungmashuri.blogspot.co.id/2011/01/pendidikan-politik.html diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan politik merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan hernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana. Pelaksanaan pendidikan politik, harus berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia. Secara tidak langsung pendidikan politik merupakan bagian integral dari keseluruhan pembangunan bangsa yang dilaksanakan sesuai dengan landasan yang telah mendasari kehidupan bangsa Indonesia.[22]

Berdasarkan Inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik adalah Landasan pendidikan politik di Indonesia terdiri dari landasan ideologis yaitu Pancasila, landasan konstitusi yaitu UUD 1945, landasan operasional, yaitu GBHN, landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Augustus 1945".[23]

Landasan yang tersebut di atas merupakan landasan pokok pendidikan politik yang disertai landasan kesejarahan. Hal ini penting karena warga negara terutama siswa harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa agar memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan 1945

pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. *Pertama,* fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politih yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. *Kedua*, fungsi

---

[22] Uung Mashuri, *Pendidikan Politik,*. 2011
[23] Inpres No. 12 Tahun 1982 ”Tentang Landasan Pokok Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. peran parpol yang telah dirasakan oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik tercantum bahwa "Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan politik. Partai politik sebagai pemain di barisan terdepan berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi rakyat. Sedangkan pendidikan politik disini bukan hanya dimaknai sebagai proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi rakyat untuk menerima nilai, norma, maupun simbol yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter.

Pendidikan Politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang terkait dengan perjuangan partai politik tersebut kepada konstituennya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai atau warga negara. Pendidikan politik sebagai aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu.

Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Selain itu, pendidikan politik ini bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya.

Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya aspek kognitif wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik.

Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan hernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling penting adalah sebagai penyaring *(filter)* terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru. dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan. serta gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Jadi, pada kesimpulannya pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh partai politik dalam memberikan arah pada generasi muda saat ini agar memiliki pemahaman yang jelas terhadap arah tujuan bangsa.

Dari pendidikan politik yang dilakukan, diharapkan akan terjadi suatu perubahan pola pikir masyarakat yang tadinya hanya dianggap sebagai sebuah rutinitas, mengarah kepada memposisikan PEMILU sebagai media untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan kedauatan secara total, sehingga memunculkan *bargaining* antara partai politik dan masyarakat.

Di dalam UU No 2 Tahun 2011, pendidikan politik diberikan perhatian khusus. Perhatian ini ditunjukkan dengan adanya *term* pendidikan politik sebagai syarat minimal yang harus dicantumkan di dalam Anggaran Dasar dari Partai Politik.[24] Lebih dari itu, pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat merupakan program yang menjadi perioritas utama dari bantuan anggaran yang diberikan negara kepada partai politik secara proporsional.[25]

Sedangkan konten dari pendidikan politik yang dimaksud haruslah berkaitan dengan beberapa hal berikut, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 34 ayat 3b.

Pasal 34

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
   a. Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
   c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pengkaderan anggota partai politik melalui jenjang yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang harus dilaksanakan oleh sebuah partai politik. Dalam hal ini, undang-undang juga mengharuskan secara

[24] UU No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 2 ayat (4).
[25] UU No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 34 ayat (3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesifik terkait rekrutmen anggota sebagai gerbang awal dari sebuah pengkaderan yang berlanjut.

Selain mekanisme rekrutmen harus dicantumkan di dalam Anggaran Dasar Partai, pasal 29 Undang-Undang Partai Politik ini mengatur khusus tentang rekrutmen.

Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
   a. anggota Partai Politik;
   b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
   d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Pendidikan politik ini dimaksudkan Undang-Undang untuk memaksimalkan fungsi partai politik terhadap rakyat juga untuk menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi yang perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif.[26]

[26] UU No 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Penjelasan Umum alinea dua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id